



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 31 Oktober 2017

Halaman: 9

TENAGA KEPENDIDIKAN

APBD Masih Bisa Atasi Kekurangan Guru

JOGJA—DPRD Kota Jogja mengklaim kekurangan guru di Kota Jogja masih bisa diatasi menggunakan APBD Kota Jogja tanpa harus menunggu pembukaan kembali pendaftaran CPNS guru. Apalagi posisi APBD Kota Jogja saat ini masih ada ruang fiskal yang cukup besar seiring ditariknya SMA/SMK ke Pemda DIY.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardianto menyatakan, bukan hanya ironi, tetapi sangat menyedihkan terkait dengan kekurangan guru di Kota Jogja.

Hanya, secara resmi Dinas Pendidikan Kota Jogja belum melaporkan persoalan ini ke legislatif. Ia meminta kepada eksekutif untuk melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada legislatif yang memiliki fungsi anggaran. Menurutnya, Komisi D sudah berulang kali mengajukan soal kebutuhan guru tersebut.

"Tetapi itu butuh komitmen yang kuat dari kepala daerah. Kunci nya niat dan kehendak politik karena

awal proses penganggarannya di sana," kata politikus PDIP ini, Senin (30/10).

Karena, kata dia, persoalan tersebut sementara bisa diatasi menggunakan APBD Kota Jogja, tanpa harus menunggu perekrutan CPNS oleh Pemerintah Pusat. Apalagi posisi Dinas Pendidikan Kota Jogja saat ini dari sisi anggaran, masih ada ruang fiskal yang besar seiring alih wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga tidak lagi direcok untuk anggaran SMA/SMK. Ia memastikan APBD Kota Jogja masih dapat mengampu kekurangan guru.

"Sebenarnya kalau ada niat politik dari kepala daerah masalah itu selesai karena honorer bisa diangkat sebagai pegawai kontrak di Pemkot Kota Jogja. Sesuai dengan UU ASN [Undang-Undang Aparatur Sipil Negara] sehingga honorernya bisa UMK [Upah Minimum Kota]. Kami selaku mitra Dinas Pendidikan minta agar memberikan laporan tertulis lengkap mengenai persoalan itu," jelasnya.

Kepala SMP N 5 Jogja Subarno mengakui, di sekolahnya pernah kekurangan guru karena ada yang pensiun. Namun, saat ini sudah bisa dicukupi dengan mengangkat guru tidak tetap (GTT). Namun pengangkatannya sangat terbatas karena penggunaan BOS hanya dibatasi 15% untuk belanja pegawai. Ia sebenarnya bermaksud mengangkat lagi sebagai cadangan untuk menggantikan guru yang harus mengikuti pelatihan selama berhari-hari, tetapi anggaran tidak memungkinkan. Oleh karena itu, pihaknya hanya bisa menyarankan kepada guru yang akan mengikuti pelatihan agar memberikan tugas kepada siswa.

"Padahal sering guru harus mengikuti penataran, sementara hanya ditnggali tugas. Hasilnya tetap beda dengan diajar langsung, sangat beda. Kalau dulu masih bisa menarik [rekrut] guru untuk mengajar pengganti yang pelatihan. Sekarang kami tidak bisa seperti itu. Sudah habis di pembatasan 15 persen tadi," kata dia. (Sunartono)

Kekurangan Guru di Kota Jogja

Jenjang SD	Jumlah Kekurangan	Total Kekurangan
■ Kekurangan	136 guru	222 guru
Rincian		
■ Guru kelas		Jumlah guru di Kota Jogja untuk TK, SD dan SMP berjumlah 5.356 orang
■ Guru Pendidikan Jaman dan Kesehatan (Penjaskes)		
Jenjang SMP		
■ Kekurangan	86 orang	
Rincian		
■ Bahasa Indonesia	15 orang	
■ IPA	4 orang	
■ Guru BK	33 orang	
■ Guru Penjaskes	9 orang	

Instansi

Dinas Pendidikan

Netral

Sejagra

Pengajuan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

■ Bahasa Indonesia	7 orang
■ IPA SMP	4 orang
■ Guru BK	7 orang
■ Penjaskes	4 orang

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Sumber: Dinas Pendidikan Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Sejagra	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005